



LAPORAN KINERJA

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TRIWULAN I
TAHUN 2020**

**STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN BELAWAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kata Pengantar

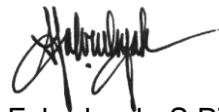
Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I Tahun 2020 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Triwulan I Tahun 2020 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2020 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (UPT Stasiun PSDKP Belawan)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2020. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Belawan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Belawan, 07 April 2020

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan



Andri Fahrulsyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19780901 200212 1 002

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan telah diintegrasikan dengan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan Lkj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan UPT Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Belawan menggunakan 3 (tiga) perspektif dalam BSC, yaitu: *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Dalam penggunaannya, Stasiun PSDKP Belawan hanya menggunakan 3 (tiga) perspektif BSC yaitu *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective* sedangkan untuk *Stakeholders Perspective* dikarenakan Stasiun PSDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja utama.

Sebagai implikasi penerapan BSC dalam upaya perencanaan Tahun 2020, Sasaran Kegiatan UPT Stasiun PSDKP Belawan bermuara pada 8 Sasaran Kegiatan (SK), yaitu: ⁽¹⁾Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis; ⁽²⁾Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan; ⁽³⁾ Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya Pemantauan SDKP; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan

SDKP;⁽⁶⁾Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP;⁽⁷⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan dan ⁽⁸⁾ Tata kelola pemerintahan yang baik.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Kegiatan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2020, sebagai hasil dari implementasi BSC, terdapat 30 IKU pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan. Pencapaian IKU Triwulan I Tahun 2020, dari 30 IKU level UPT Stasiun PSDKP Belawan terdapat 14 (empat belas) IKU berstatus Putih (tidak ada skor), IKU berwarna kuning tidak ada, IKU berwarna merah tidak ada, serta 16 (enambelas) IKU berwarna hijau (terealisasi 100%).

Realisasi anggaran tahun 2020 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai 31 Maret 2020 sebesar **13,25%** atau sebesar Rp **10.159.725.258,-** (*Sepuluh Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu Rp. **76.652.522.000,-** (*Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*). Melalui Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan Tahun 2020.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Data Umum Organisasi.....	2
D. Isu Aktual	5
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024	6
B. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024	6
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	9
D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2020	14
1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2020	14
B. Analisis Pencapaian Kinerja.....	18
1. Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat.....	18
2. Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.....	18
3. Sasaran Kegiatan 3 : Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.....	23
4. Sasaran Kegiatan 4 : Terselenggaranya Pemantauan Sumber Daya Perikanan.....	27
5. Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	30
6. Sasaran Kegiatan 6 : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP.....	33

7. Sasaran Kegiatan 7 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan.....	37
8. Sasaran Kegiatan 8 : Tata kelola pemerintahan yang baik.....	39
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	46
LAMPIRAN	48

Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2020	10
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2020	14
Tabel 3. Hasil Pengukuran Sub IKU Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	19
Tabel 4. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	24
Tabel 5. Tahapan pemeriksaan kapal perikanan dikatakan taat.....	25
Tabel 6. Tahapan pemeriksaan unit usaha pengolahan hasil perikanan dikatakan taat ..	26
Tabel 7. Tahapan pemeriksaan unit usaha distribusi hasil perikanan dikatakan taat.....	26
Tabel 8. Tahapan pemeriksaan unit usaha pembudidayaan ikan dikatakan taat.....	27
Tabel 9. Capaian Presentase Terselenggaranya pemantauan SDKP TW I Tahun 2020.	27
Tabel 10. Capaian IKU pada SK-5 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP”	30
Tabel 11. Lokasi dan ukuran serta kondisi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang siap operasi.	32
Tabel 12. Lokasi dan ukuran serta kondisi speed boat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang siap operasi.....	32
Tabel 13. Capaian IKU pada SK-6 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP”	33
Tabel 14. kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas.....	34
Tabel 15. kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat pengawas..	35
Tabel 16. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	35
Tabel 17. Capaian IKU pada SK-7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan”	38
Tabel 18. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari – Maret 2020	45

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan	4
Gambar 2. Peta Sasaran Strategis Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2020	10
Gambar 3. Cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas	29
Gambar 4. Capaian IKU unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan	41
Gambar 5. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2020 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan - kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawas SDKP Belawan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "*good governance*".

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2020 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan

program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap bulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

c. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Belawan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi,serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawai Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Kepala Subseksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Jabatan Fungsional dan Satuan Pengawasan dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

a) Kepala Stasiun :

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Urusan Tata Usaha:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c) Kepala Subseksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran:

Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

d) Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana Pengawasan:

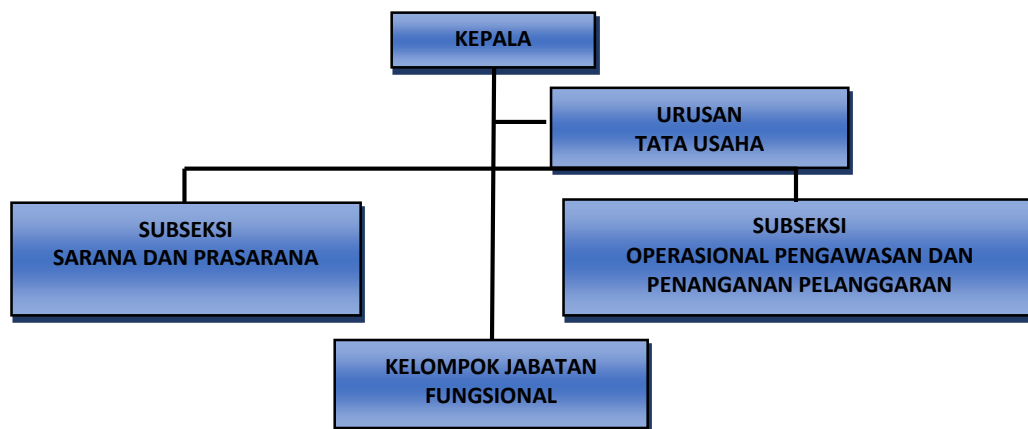
Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

e) Kelompok Jabatan Fungsional:

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

f) Satuan Pengawasan SDKP:

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan diwilayah kerja masing - masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi 3 (Tiga) Satuan Pengawasan (Satwas) sebagai mana Struktur Organisasi pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

D. Isu Aktual

Isu aktual yang di hadapi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Masih dijumpai kegiatan penangkapan yang tidak ramah lingkungan atau Alat Tangkap Terlarang seperti penggunaan Trawl;
2. Masih terjadi konflik antar nelayan berhubungan dengan alat tangkap dan daerah penangkapan;
3. Terjadinya degradasi lingkungan pesisir (mangrove, terumbu karang, lamun) akibat aktivitas manusia (*anthropogenic activities*).
4. Tidak optimalnya hari operasi speedboat disebabkan oleh kerusakan mesin speedboat Napoleon.
5. Kurangnya armada speedboat untuk patroli disebabkan pada tahun 2019, 1 Unit Speedboat Dolphin 005 telah di lelang.
6. Masih ditemukan kapal kapal perikanan ukuran > 30 GT yang terpantau / terdapat indikasi pelanggaran menangkap ikan di luar daerah penangkapan ikan;
7. Pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan (oleh industry unit pengolahan ikan).

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perjanjian Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2020.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020; ⁽²⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dan ⁽³⁾ Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2020.

A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 5 (lima) arah kebijakan utama tahun 2020-2024, yaitu:

- A. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.
- B. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
- C. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
- D. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- E. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

B. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015-2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya)

- b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut
 - b. Pertukaran data
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*).
 - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan kesadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”

- f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

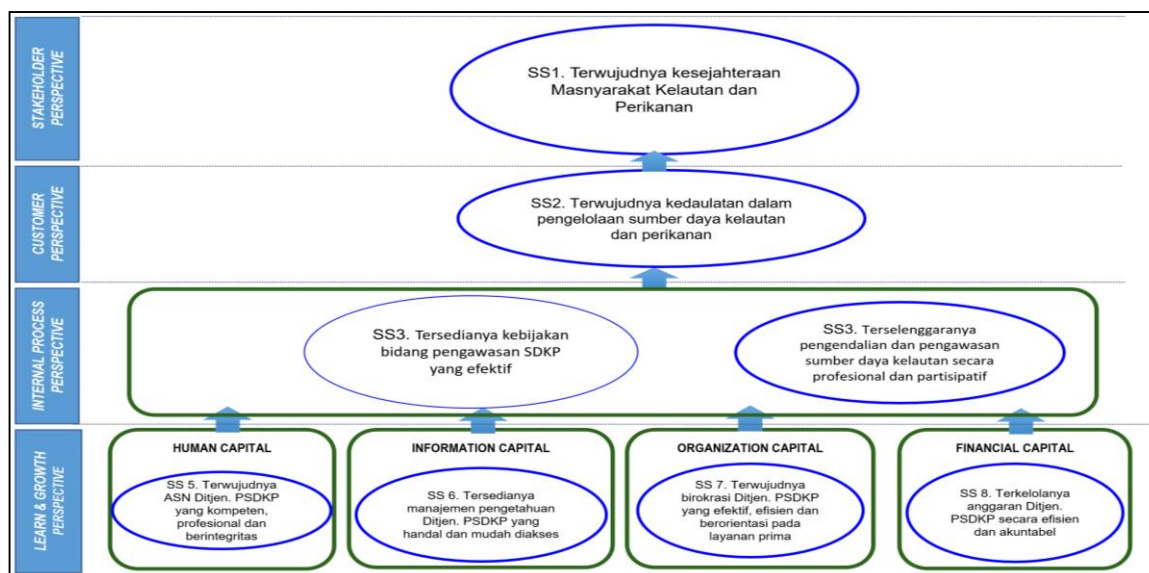
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, ⁽⁴⁾ sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Belawan menggunakan 4 (empat) perspektif dalam BSC, yaitu: *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Dalam penggunaannya, Stasiun PSDKP Belawan hanya menggunakan 3 (tiga) perspektif BSC yaitu *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective* sedangkan untuk *Stakeholders Perspective* dikarenakan Stasiun PSDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja utama.

Sasaran Strategis hasil implementasi BSC Tahun 2020 dipetakan dalam Peta Sasaran Strategis pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Peta Sasaran Strategis Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2020

Stakeholders perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholders*. *Customers Perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal Process Perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan *customer*. Sedangkan *Learning and Growth Perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	70
2.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan [pelaku usaha]	16
3.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100

4.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	1.01
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	0,07
		6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7. Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1
		8. Jumlah Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1
		9. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	2
		10. Jumlah <i>speedboat</i> yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	2
6.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	11. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	300
		12. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit)	80
		13. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	150
		14. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	60
		15. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (orang)	22
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	16. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		17. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93

		18. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
8.	Tata kelola pemerintahan yang baik	19. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan [Indeks]	72
		20. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82
		21. Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
		22. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	1
		23. Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
		24. Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
		25. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan [Indeks]	80
		26. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Baik [88]
		27. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun PSDKP Belawan dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan TA. 2019 [%]	1
		28. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
		29. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
30. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100		

D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja BSC berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id) .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2020

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2020

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, pada Tahun 2020 Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 7 (Tujuh) Sasaran Strategis (SS) dengan 28 (Dua Deelapan) IKU. Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2020 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2020


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TARGET TW I	REALISASI TW I	PERSENTASI
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	70	0	0	0
2.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan [pelaku usaha]	16	4	7	175%
3.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100%
4.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	1.01	0	0	0
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan ilegal	0,07	0	0	0

		Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)				
		6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70	70	70	100%
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7. Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1	0	0	0
		8. Jumlah Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1	0	0	0
		9. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	2	2	2	100%
		10. Jumlah <i>speedboat</i> yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	2	2	2	100%
6.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	11. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	300	90	98	109%
		12. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit)	80	20	20	100%
		13. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	150	40	44,5	111%
		14. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	60	5	5	100%
		15. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh	22	0	0	0

		pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (orang)				
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	16. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100%
		17. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	93	93	100%
		18. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	93	93	100%
8.	Tata kelola pemerintahan yang baik	19. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan [Indeks]	72	0	0	0
		20. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82	65	100	154%
		21. Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	0	0	0
		22. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	1	0	0	0
		23. Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	0	0	0
		24. Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	0	0	0

		25. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan [Indeks]	80	0	0	0
		26. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Baik [88]	0	0	0
		27. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun PSDKP Belawan dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan TA. 2019 [%]	1	0	0	0
		28. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	100	100	100%
		29. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	100	100	100%
		30. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	100	100	100%

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Baik (Skor >=100)
2		Hati-hati (80 <=Skor<100)
3		Buruk (Skor < 80)
4		Belum Ada Skor

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Selama periode Triwulan I Tahun 2020 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat

Pencapaian Sasaran Strategis “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: “Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan”.

Capaian IKU ⁽¹⁾ “Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan target yang ditetapkan sebesar 70 %. Pada TW I Tahun 2020 IKU tersebut belum memiliki capaian, target capaian akan terealisasi pada akhir tahun yaitu 70 %.

Capaian IKU TW I pada tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU TW I pada tahun 2019, karena pada tahun 2019 IKU ini tidak ada. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 adalah Rp 0,- (*Belum ada realisasi anggaran*) dengan persentase (0 %) dari anggaran yang dialokasikan 12.600.000,- (*Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

2. Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan

Pencapaian Sasaran Strategis “Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan” diidentifikasi ke dalam IKU yaitu: “**Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan**” Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari agregasi 5 (lima) Sub IKU Pengawasan SDK yaitu: ⁽¹⁾ Kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽²⁾ Jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽³⁾ Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽⁴⁾ Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽⁵⁾ Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang

diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pada TW I ditargetkan sebanyak 4 pelaku usaha yang di periksa kepatuhannya, capaian pada TW I melebihi dari yang ditargetkan yaitu tercapai sebanyak 7 unit pelaku usaha yang di periksa kepatuhannya atau dengan persentase capaian 175,00%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Pencapaian IKU pelaku usaha yang di periksa kepatuhannya pada TW I tahun 2020 lebih banyak bila di bandingkan pada capaian TW I tahun 2019, karena pada TW I tahun 2019 Pelaku usaha yang di periksa sebanyak 4 sementara pada TW I tahun 2020 pelaku yang di periksa sebanyak 7 pelaku usaha. Capaian IKU ⁽¹⁾ “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, diperoleh dari hasil pengukuran agresi 5 (lima) Sub-IKU, sebagaimana pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Pengukuran Sub IKU Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW	REALISASI
1	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	2	3
2	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	2	0
3	Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	4	2
4	Jumlah Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	1	0
5	Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	7	2
Total Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan		16	7

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator kinerja Utama pada TW I tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan :
 - a. **Pengawasan pengelolaan mangrove dilakukan di Desa Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara** dengan uraian sebagai berikut :
 - Pemanfaatan kawasan mangrove untuk kegiatan perikanan seperti pembukaan tambak sering kali tidak memperhatikan aspek kelestarian mangrove itu sendiri. Salah satu cara untuk menangani hal tersebut adalah dengan suatu konsep pemanfaatan kawasan mangrove berbasis konservasi yang disebut dengan sistem silvofishery;
 - Adapun silvofishery yang diterapkan di desa Sicanang (3°45'78" LU 98°38'42" BT) ini berjalan dengan baik dengan ditokohi oleh Bapak Syahdan dengan didukung oleh bantuan dari pemerintah daerah untuk menjadi wilayah silvofishery percontohan bagi para petambak-petambak lain untuk meningkatkan produktivitas perikanan serta menjaga hutan mangrove agar tetap terjaga kelestariannya. Luasan mangrove silvofishery yang dimiliki oleh Bapak Syahdan seluas kurang lebih 5 Ha;
 - Kondisi mangrove di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Labuhan yang terletak di wilayah silvofishery Sicanang secara umum dalam kondisi baik dan terjaga karena kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan mangrove yang merupakan tempat beruayanya ikan untuk mendapatkan hasil perikanan yang maksimal.
 - b. **Pengawasan pengelolaan mangrove dilakukan di Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara** dengan uraian sebagai berikut :
 - Menurut informasi dari Kepala Desa Paluh Manan (bpk Syarifuddin) dan Pokmaswas Paluh Manan (bpk Nasrul) bahwa hutang mangrove di Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang sebelum tahun 1998 adalah sekitar 200 Ha. Namun sejak tahun 1998 mulai dibuka lahan tambak di daerah ini yang mengakibatkan hutan mangrove di daerah ini perlahan – lahan menjadi berkurang, diikuti dengan pembukaan perkebunan sawit. Pada saat ini hutan mangrove di daerah ini diperkirakan hanya sekitar 2 Ha;

- Melihat kondisi ini para nelayan yang ada di Paluh Manan melalui Pokmaswas meminta agar lahan mangrove dikembalikan minimal di wilayah pesisir pantai.
 - c. **Pengawasan pengelolaan mangrove dilakukan di Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara** dengan uraian sebagai berikut :
 - Kondisi mangrove di Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan yang terletak di Ekowisata Pantai Mangrove Sei Nagalawan secara umum dalam kondisi baik dan terjaga;
 - Diperlukan pengawasan secara lebih intensif dan kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait, sehingga kelestarian dan keseimbangan ekosistem perairan tetap terjaga.
2. Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan :
- a. Pantai Cermin Theme Park & Resort Hotel**
- Wisata bahari ini berhadapan langsung dengan pemandangan Pantai Cermin, dilengkapi dengan Theme Park yang dikelola dengan baik, menyediakan penginapan, ruang meeting, dan memiliki restoran;
 - Tiket masuk ke Theme Park ialah sebesar Rp 35.000 pada hari biasa dan Rp 45.000 pada hari Sabtu dan Minggu;
 - Menurut Bapak Samuel Hasibuan, selaku HRD, yang ditemui di lokasi, usaha wisata bahari Pantai Cermin Theme Park & Resort Hotel ini sudah memiliki izin, namun pada saat pengawasan dilakukan, izin sedang tidak ada di lokasi karena dipegang oleh pemilik yang sedang tidak ada di tempat;
 - Dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Pantai Cermin Theme Park & Resort Hotel dapat dilihat bahwa wisata bahari ini memiliki fasilitas yang lengkap dan telah dikelola dengan baik. Tidak ditemukan adanya pelanggaran ataupun indikasi dampak kerusakan lingkungan akibat usaha ini.
- b. Pantai Bali Lestari**
- Wisata Bahari ini terletak di pinggir Pantai Cermin dengan luasan sebesar kurang lebih 11 Ha. Pantai Bali Lestari berdiri pada tahun 2016 dan dikelola oleh pemilik usaha bernama Bapak Salim;
 - Pantai Bali Lestari sudah memiliki dokumen perizinan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat pengawasan dilakukan, dokumen

perizinan tidak dapat ditunjukkan karena dokumen dipegang oleh pemilik yang sedang tidak di tempat. Namun kemudian dokumen perizinan dikirimkan melalui *e-mail*. Adapun dokumen perizinan yang dimiliki oleh Pantai Bali Lestari ialah sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 8120110261482 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Pelenggara OSS pada tanggal 18 Desember 2018;
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Pelenggara OSS pada tanggal 18 Desember 2018; dan
 3. Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Pelenggara OSS pada tanggal 18 Desember 2018.
3. Pelaku usaha usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu 3 Pelaku Usaha. Adapun pelaku usaha tersebut adalah:
- a. **PT. Bahari Makmur Sejati**
 - Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan dengan komoditas yang dihasilkan yaitu berupa udang beku jenis vannamei;
 - Air yang digunakan oleh PT Bahari Makmur Sejati untuk keperluan produksinya berasal dari sumur bor. Penanganan limbah di PT Bahari Makmur Sejati dilakukan dengan melakukan pengendapan terlebih dahulu, kemudian penanganan limbah lebih lanjut dilakukan dengan sistem IPAL terpadu di gedung pengolahan limbah KIM. Limbah cair hasil produksi dialirkan dengan menggunakan pipa langsung ke KIM. Limbah cair ini berasal dari air yang digunakan pada saat kegiatan pembilasan dan pencucian bahan baku, pembersihan lantai dan juga peralatan kerja.
 - b. **PT. Medan Tropical Canning & Frozen Industries**
 - Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan dengan komoditas yang dihasilkan yaitu berupa ikan patin, makarel, udang, kepiting, tuna, cumi-cumi, dan kerang;
 - Air yang digunakan oleh PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries untuk keperluan produksinya berasal dari air PAM. Penanganan limbah di PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries dilakukan dengan melakukan pengendapan

di dalam bak berukuran 3x5x2 m3. Setelah proses pengendapan, limbah dialirkan melalui pipa yang dialirkan ke gorong-gorong khusus ke gedung pengolahan limbah KIM untuk diproses lebih lanjut. Limbah cair ini berasal dari air yang digunakan pada saat kegiatan pembilasan dan pencucian bahan baku, pembersihan lantai dan juga peralatan kerja. PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries memiliki dua saluran pembuangan, yaitu saluran pembuangan khusus produksi kaleng dan saluran pembuangan khusus produksi beku. Tiap bulannya PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries menghasilkan kurang lebih sekitar 5.100 m3 limbah cair.

Untuk mencapai sasaran strategis kegiatan – 2 ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 196.750.000 (*Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan sampai dengan 31 Maret 2020 telah terealisasi sebesar Rp.7.065.840 (*Tujuh Juta Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*) atau 3,59%.

3. Sasaran Kegiatan 3 : Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan” diidentifikasi ke dalam IKU yaitu **”Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”** Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari persentase capaian jumlah pelaku usaha bidang perikanan yang terdiri dari agresi 4 (empat) Sub IKU Pengawasan SDP yaitu: ⁽¹⁾ Kapal perikanan yang patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan; ⁽²⁾ Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan; ⁽³⁾ Unit Usaha Budidaya Ikan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan; ⁽⁴⁾ Usaha distribusi perikanan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan; dengan hasil capaian 100% .

Pada TW I tahun 2020 ditargetkan sebanyak 100 % pelaku usaha perikanan yang di periksa kepatuhannya, capaian pada TW I tercapai sesuai dengan yang ditargetkan yaitu tercapai sebanyak 100% unit pelaku usaha perikanan yang di periksa kepatuhannya atau dengan persentase capaian 100 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Capaian IKU TW I pada tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU TW I pada tahun 2019, karena pada tahun 2019 IKU ini tidak ada. Capaian IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, diperoleh dari hasil pengukuran agresi 4 (empat) Sub-IKU, sebagaimana pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	TARGET TW I	REALISASI CAPAIAN
1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
2	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
3	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan		100	100	100

Untuk Pembahasan capaian kinerja masing-masing sub IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, sebagai berikut:

a. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Nilai capaian Sub-IKU tersebut diperoleh dari jumlah kapal yang diperiksa kepatuhannya yang laik operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Kapal yang diperiksa kepatuhannya yang sesuai dengan IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Pencapaian ini diupayakan melalui kegiatan: Monitoring dan evaluasi ketaatan kapal melalui Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal

perikanan yang beroperasi di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan, yang menangkap ikan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Berdasarkan hasil analisis selama bulan Januari sampai dengan Maret 2020. Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 5 Berikut:

Tabel 5. Tahapan pemeriksaan kapal perikanan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,25	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan teknis	0,25	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,25	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

- b. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP)* serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate (HC)* bagi usaha yang mengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambahan Berbahaya (BTB). Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 6 Berikut:

Tabel 6. Tahapan pemeriksaan unit usaha pengolahan hasil perikanan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,25	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,25	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,25	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

- c. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil pengawasan distribusi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, lingkup wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 7 Berikut:

Tabel 7. Tahapan pemeriksaan unit usaha distribusi hasil perikanan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,25	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,25	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,25	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pengawasan terhadap usaha budidaya ikan meliputi dokumen perizinan, obat dan pakan ikan yang digunakan. Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pembudidayaan ikan Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 8 Berikut:

Tabel 8. Tahapan pemeriksaan unit usaha pembudidayaan ikan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi dan Kelayakan Teknis	0,25	Berita Acara Hasil Pengawasan di Simwaskan
3	Pemeriksaan Kesesuaian Kegiatan Usaha, Sarana dan Prasarana	0,25	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,25	Laporan Hasil Pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Untuk mencapai sasaran kegiatan – 3 ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 501.024.000 (*Lima Ratus Satu Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*) dan sampai dengan 31 Maret 2020 telah terealisasi sebesar Rp.79.070.198 (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) atau 15,78%.

4. Sasaran Kegiatan 4 : Terselenggaranya Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 4 “Terselenggaranya pemantauan SDKP” diidentifikasi ke dalam 3 (tiga) IKU, yaitu: (1) Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (2) Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (3) Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP. Adapun capaian dari Sasaran Kegiatan - 4 dapat dilihat pada table 9 sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERSENTASE CAPAIAN (%)	TARGET TW I	CAPAIAN
1	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0,60	0,36	0,36

2	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0,07	0,0052	0,0052
3	Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP	70	70	70

Tabel 9. Capaian Presentase Terselenggaranya pemantauan SDKP TW I Tahun 2020

Penjelasan masing-masing IKU pada Sasaran Kegiatan - 4 Terselenggaranya Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

(1) IKU Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU Presentase Cakupan WPP-NRI Yang Terawasi Dari *IUU Fishing* dan Kegiatan Yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan akan memberikan kontribusi terhadap capaian IKU Tingkat Keberhasilan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan secara nasional, yang ditargetkan oleh Direktorat Pemantauan Operasional Armada (POA) sebesar 2,24 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Pengukuran kinerja diperoleh dari perhitungan Cakupan Laut melalui operasi Kapal Pengawas Perikanan Hiu 01 dan Hiu 08 Pada periode Tahun 2020, Operasi Kapal pengawas dilaut telah dilaksanakan dengan jumlah hari operasi rata-rata sebanyak 44,5 hari operasi dengan dukungan Kapal pengawas sebanyak 2 Unit Kapal, yaitu KP. Hiu 01 dan KP. Hiu 08.

Capaian IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2019, karena IKU ini adalah IKU baru dan tidak ada pada tahun 2019. Berdasarkan hari operasi Pada Triwulan I tahun 2020 diperoleh cakupan area yang mampu diawasi oleh kapal pengawas seluas 6.795 nm² (nautica mile) atau sebesar 0,36 % sama dengan target TW I tahun 2020 yaitu sebesar 0,36%. Perhitungan tersebut dapat di lihat pada Gambar 3 sebagai berikut:

No	UPT PSDKP	No	Kapal Pengawas	Kelas	Total Hari	Jam Operasi (jam)	Kesepatan Dinas (NM/jam)	Jangkauan Efektif Radar (NM)	Cakupan Teoritis (CT) NM ²	Area Operasi Utama	Faktor Koreksi WPP (Fwpp)	Faktor Koreksi Kapal (Fkp)	Cakupan Aktual (CA) NM ²	%Cakupan Aktual
Total									133.784				32.611	1,89
7	Stasiun PSDKP Belawan	11	Hu 01	D	47	420,9	15	9	58.822	571	0,20	0,30	3.409	0,18
		12	Hu 08	D	42	417.993	15	9	58.429	571	0,20	0,30	3.386	0,18
Total									113.251				6.795	0,35

Gambar 3. Cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas

(2) Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU Presentase Cakupan WPP-NRI Yang Terawasi Dari *IUU Fishing* dan Kegiatan Yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan akan memberikan kontribusi terhadap capaian IKU Tingkat Keberhasilan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan secara nasional, yang ditargetkan oleh Direktorat Pemantauan Operasional Armada (POA) sebesar 0,26 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

IKU ini tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan capaian pada tahun 2019, karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2020. Pengukuran kinerja diperoleh dari perhitungan Cakupan Laut melalui operasi *Speedboat* pengawasan. Pada periode Tahun 2020, Operasi *Speedboat* pengawasan dilaut telah dilaksanakan dengan jumlah hari operasi sebanyak 5 hari operasi dengan dukungan *Speedboat* pengawasan sebanyak 1 Unit *Speedboat*. Berdasarkan hari operasi tersebut Pada Triwulan I tahun 2020 diperoleh cakupan area yang mampu diawasi oleh *Speedboat* sebesar 0,0052 % dari Target TW I tahun 2020 yaitu sebesar 0,0052% dengan presentase capaian 100%.

(3) IKU Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP

IKU Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP Stasiun PSDKP Belawan merupakan IKU baru dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 70 %, pada TW I tahun 2020 sudah tercapai 70%.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2019, karena IKU ini baru ada pada tahun 2020.

5. Sasaran Kegiatan 5 : Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP

Dalam rangka pencapaian SK-5 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 4 (empat) IKU, yaitu: (1) Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit); (2) Jumlah bangunan/pos pengawasan yang di bangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (3) Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit); (4) Jumlah *speedboat* yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit). Adapun Capaian IKU pada SK-5 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP” dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 10. Capaian IKU pada SK-5 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2020	TARGET TW I	CAPAIAN
Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1 unit	0 unit	0
Jumlah bangunan/pos pengawasan yang di bangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan	1 unit	0 unit	0
Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	2 unit	2 unit	2 unit
Jumlah <i>speedboat</i> yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	2 unit	2 unit	2 unit

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SK-5 sebagai berikut:

(1) IKU Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)

Terselenggaranya pembangunan kapal pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan ditargetkan sebanyak 1 (satu) unit yang merupakan wujud keseriusan KKP khususnya DJ-PSDKP dalam memerangi ancaman *IUU Fishing* . Kegiatan ini merupakan kegiatan yang masuk dalam Prioritas Nasional, untuk mendukung pencapaian IKU kapal pengawas yang dibangun dibutuhkan dukungan Biaya sebesar Rp.43.396.860.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Pada Periode TW I tahun 2020 IKU kapal pengawas yang dibangun belum ada capaian, IKU akan tercapai 1 (unit) Unit speedboat pengawas yang dibangun pada TW IV Tahun 2020.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2019, karena ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020.

(2) IKU Jumlah bangunan/pos pengawasan yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)

Terselenggaranya pembangunan bangunan/pos pengawasan yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan ditargetkan sebanyak 1 (satu) unit yang merupakan wujud keseriusan KKP khususnya DJ-PSDKP dalam mendukung kegiatan pengawasan SDKP . Kegiatan ini merupakan kegiatan yang masuk dalam Prioritas Nasional, untuk mendukung pencapaian IKU bangunan/pos pengawasan yang dibangun dibutuhkan dukungan Biaya sebesar Rp.1.135.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tigas Puluh Lima Juta Rupiah). Pada Periode TW I tahun 2020 IKU bangunan/pos pengawasan yang dibangun belum ada capaian, IKU akan tercapai 1 (unit) Unit bangunan/pos pengawasan yang dibangun pada TW IV Tahun 2020.

Capaian IKU ini sama dengan capaian IKU Pada TW I Tahun 2019 dimana bangunan /pos pengawasan yang di bangun belum terealisasi pada TW I.

(3) IKU Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU kapal pengawas yang siap operasi pada Stasiun PSDKP Belawan di dukung oleh 2 (dua) unit Kapal Pengawas yaitu HIU 01 dan HIU 08. Kegiatan utama IKU ini merupakan kesiapan kapal pengawas yang siap melakukan operasi pengawasan,

diantaranya dengan melakukan pengecekan mesin, perawatan kapal pengawas dan serta pemeliharaan kapal pengawas. Pada Triwulan I tahun 2020 jumlah kapal Pengawas yang siap Operasi sebanyak 2 (dua) unit kapal pengawas.

Capaian IKU ini pada TW I tahun 2020 sama dengan capaian pada TW I tahun 2019. Data dukung capaian IKU ini tercantum dalam Tabel 11 berikut:

Tabel 11. Lokasi dan ukuran serta kondisi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang siap operasi.

Keterangan	Jumlah Kapal	Target Triwulan I	Capaian
<i>Jumlah Kapal Pengawas yang siap operasi</i>			
KP. Hiu 01	1	1	1
KP. Hiu 08	1	1	1
TOTAL	2 Unit	2 Unit	2 Unit

(4) IKU Jumlah *speedboat* yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU *speed boat pengawas* yang siap operasi pada Stasiun PSDKP Belawan di dukung oleh 2 (dua) unit *speed boat pengawas*. Kegiatan utama IKU ini merupakan kesiapan *speedboat* pengawas yang siap melakukan operasi pengawasan, diantaranya dengan melakukan pengecekan mesin, perawatan *speed boat pengawas* disertai pemeliharaan *speed boat pengawas*. Pada Triwulan I jumlah *Speedboat* yang siap operasi sebanyak 2 (dua) unit.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2019, karena ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020. Data dukung capaian IKU ini tercantum dalam Tabel 12 berikut:

Tabel 12. Lokasi dan ukuran serta kondisi *speed boat pengawas* lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang siap operasi.

Keterangan	Jumlah Kapal	T arget Triwulan I	Capaian
<i>Jumlah speed boat pengawas yang siap operasi</i>			
Napoleon 028 (Stasiun PSDKP Belawan)	1	1	1
Dolphin 014 (Satwas SDKP Tanjung Balai Asahan)	1	1	1
TOTAL	2 Unit	2 Unit	2 Unit

6. Sasaran Kegiatan 6 : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP

Dalam rangka pencapaian SK-6 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 5 (lima) IKU, yaitu: (1) Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas; (2) Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan *speedboat*; (3) Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (4) Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (5) Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Adapun Capaian IKU pada SK-6 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP” dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Capaian IKU pada SK-6 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (TAHUN)	TARGET TW I	CAPAIAN
Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	300 unit	90 unit	98 unit
Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit)	80 unit	20 unit	20 unit
Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	150 hari	40 hari	44,5 hari
Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	60 hari	5 hari	5 hari
Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (orang)	22 orang	0 orang	0 orang

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SK-6 sebagai berikut:

1. IKU “Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas “

Untuk mendukung tercapainya IKU “Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas” didukung oleh Kapal Pengawas Hiu 01 dan Hiu 08 yang siap operasi, di tahun 2020 ditargetkan sebanyak 300 unit kapal perikanan yang di periksa dilaut. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Pada Periode TW I telah tercapai 98 unit kapal perikanan yang diperiksa dilaut , melebihi dari yang ditargetkan pada TW I sebanyak 90Unit kapal Perikanan yang di periksa.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2019, karena ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020. Capaian IKU jumlah kapal yang diperiksa dilaut menggunakan kapal pengawas dapat di lihat pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET TW I	CAPAIAN
Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	300 unit	90 unit	98 unit

2. IKU “Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat “

Untuk mendukung tercapainya IKU “Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat” didukung oleh speedboat yang siap operasi sebanyak 2 (dua) unit, di tahun 2020 ditargetkan sebanyak 80 unit kapal perikanan yang di periksa dilaut. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Pada Periode TW I telah tercapai 20 unit kapal perikanan yang diperiksa dilaut , sama dari yang ditargetkan pada TW I sebanyak 20 Unit kapal Perikanan yang di periksa.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2019, karena ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020 Capaian IKU jumlah kapal yang diperiksa dilaut menggunakan kapal pengawas dapat di lihat pada Tabel 15 berikut:

Tabel 15. kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat pengawas

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET TW I	CAPAIAN
Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	80 unit	20 unit	20 unit

3. IKU “Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Kegiatan operasional pengawasan kegiatan *IUU Fishing* dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP-NRI Wilayah Barat didukung oleh 2 (dua) unit Kapal Pengawas yaitu KP. Hiu 01 dan KP. Hiu 08. Capaian IKU Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Tahun 2020 di targetkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) hari operasi. Pada TW I telah tercapai rata-rata 44,5 hari Operasi menggunakan Kapal Pengawas Hiu 01 dan Hiu 08 , melebihi dari target yang telah di tetapkan pada TW I Tahun 2020 yaitu rata-rata 40 Hari Operasi di lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Capaian IKU jumlah hari operasi rata-rata kapal pengawas pada TW I 2020 tercapai sebanyak 44,5 hari operasi, dibandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2019 IKU ini mengalami peningkatan rata-rata sebanyak 27 hari operasi, karena capaian hari operasi kapal pengawas pada TW I 2019 rata-rata sebanyak 17,5 hari operasi. Adapun rincian capaian hari operasi rata-rata kapal pengawas pada tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET TW I	CAPAIAN
Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	150 Hari Operasi	40 Hari	44,5 Hari

Adapun realisasi anggaran untuk pencapaian IKU Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Hari Operasi) sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 adalah 1.711.036.208,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*) dengan persentase (13,85%) dari anggaran

yang dialokasikan Rp 12.355.480.000,- (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

4. IKU “Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)”

Kegiatan utama IKU ini merupakan pengawasan kegiatan *IUU Fishing* dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP-NRI dengan menggunakan 2 (dua) unit speedboat PSDKP dengan target hari Operasi *Speed Boat* pada tahun 2020 sebanyak 60 (enam puluh) Hari Operasi. Pada TW I telah tercapai 5 hari Operasi menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan, sesuai dari target yang telah ditetapkan pada TW I Tahun 2020 yaitu 5 Hari Operasi di lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Capaian IKU jumlah hari operasi *Speedboat* pada TW I 2020 tercapai sebanyak 5 hari operasi, dibandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2019 IKU ini mengalami penurunan sebanyak 1 hari operasi, karena capaian hari operasi *Speedboat* pada TW I 2019 sebanyak 6 hari operasi.

Kegiatan utama yang dilaksanakan Tahun 2020 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat sebagai berikut:

- Speed Boat Dolphin 014 Ukuran (8 Meter) Kelas F , Lokasi Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan capaian hari operasi pada TW I tahun 2020 yaitu sebanyak 5 hari operasi dengan hasil pemeriksaan terhadap kapal ikan dilaut sebanyak 20 unit kapal.

Untuk mendukung capaian IKU “Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat UPT Stasiun PSDKP Belawan” dialokasikan anggaran sebesar Rp.826.620.000,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) sampai dengan 31 Maret 2020 belum ada terealisasi.

5. IKU “Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Awak kapal pengawas merupakan ujung tombak sebagai penegak hukum dibidang perikanan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Dalam menjalankan tugasnya guna mendukung kegiatan operasi pengawasan SDKP awak

kapal pengawas harus selalu siap dalam segala hal baik mental, fisik untuk mengawaki 1 (satu) unit kapal pengawas di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Dilihat dari hal tersebut perlu adanya upaya untuk mewujudkan awak kapal pengawas yang sehat, terampil, professional dan siap dalam melaksanakan tugas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, maka perlu adanya pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) secara berkala bagi setiap awak Kapal Pengawas, untuk mengetahui kondisi kesehatan dan kesiapan fisik bagi awak kapal pengawas. Dengan kondisi kesehatan awak kapal pengawas yang sehat maka dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dilaut dengan baik.

Untuk mendukung IKU tersebut pada tahun 2020 telah ditargetkan oleh Direktorat Pengoperasian Operasional Armada (POA) sebanyak 22 Orang Awak kapal Pengawas Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Pada TW I belum ada Awak Kapal yang melakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*).

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2019, karena ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020

Untuk mendukung capaian IKU “Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dialokasikan anggaran sebesar Rp.32.400.000,- (*Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) sampai dengan 31 Maret 2020 anggaran tersebut belum ada terserap/terrealisasi.

7. Sasaran Kegiatn 7 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka pencapaian SK-7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 3 (tiga) IKU, yaitu: (1) Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (2) Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (3) Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan. .

Adapun Capaian IKU pada SK-7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan pada Tabel 17.

Tabel 17. Capaian IKU pada SK-7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2020	TARGET TW I	CAPAIAN
Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100%	100	100
Persentase Jumlah kapal perikanan yang diperiksa Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93%	93	93
Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93%	93	93

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SK-7 sebagai berikut:

1. IKU Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%).

Target yang di tetapkan pada tahun 2020 untuk IKU Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu 100%. Pada periode TW I capaian IKU ini telah terealisasi 100% dari 1 tindak pidana perikanan yang di tangani.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2019, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020.

2. IKU Jumlah kapal perikanan yang diperiksa Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%).

Target yang di tetapkan pada tahun 2020 untuk IKU Jumlah kapal perikanan yang diperiksa Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) yaitu 93%. Pada periode TW I capaian IKU Penyelesaian

Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan terealisasi 93% dari 1 tindak pidana perikanan yang di tangani pada TW I tersebut.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2019, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020.

3. IKU Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

Target yang di tetapkan pada tahun 2020 untuk IKU Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) yaitu 93%. Pada periode TW I capaian IKU Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan terealisasi 93% dari 1 tindak pidana perikanan yang di tangani pada TW I tersebut.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2019, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020.

Untuk mendukung capaian SK-7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan” dialokasikan anggaran sebesar Rp.384.000.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah*) sampai dengan 31 Maret 2020 belum ada realisasi anggaran yang terserap dengan persentase sebesar 0 %.

8. Sasaran Kegiatan 8 : Tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam rangka pencapaian SK-8 “Tata kelola pemerintahan yang baik” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 12 (dua belas) IKU, yaitu: (1) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (2) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup; (3) Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (4) Unit kerja berpredikat WBK; (5) Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (6) Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (7) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan; (8) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (9) Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun PSDKP Belawan dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan TA. 2019; (10) Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (11) Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP

Belawan dan (12) Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SK-8 sebagai berikut:

(1) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan

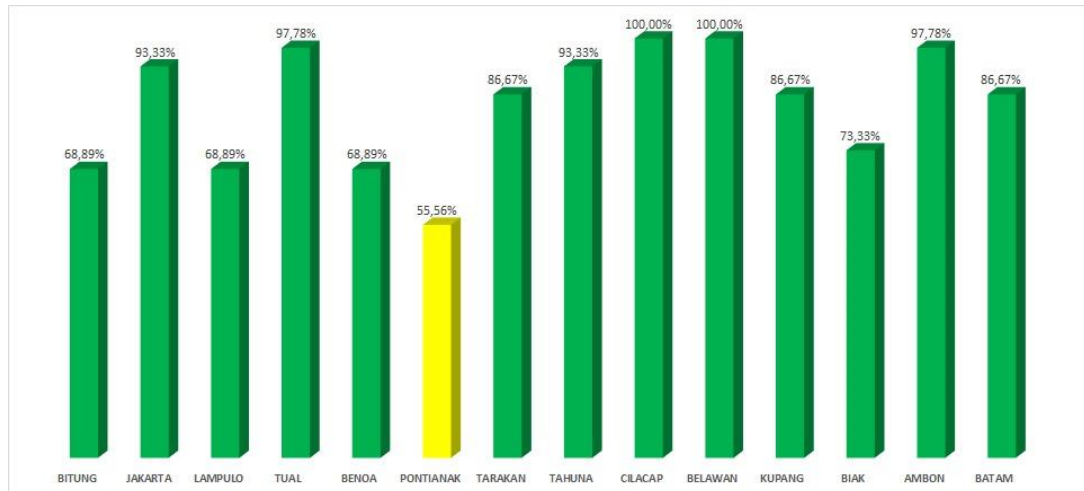
Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

IKU yang digunakan adalah “indeks kompetensi dan integritas Stasiun PSDKP Belawan” dimana capaian yang diperoleh melalui metode adopsi langsung dari atasan dengan target telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP yaitu sebesar 72. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu: 1) hasil *asesment* eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP; 2) tingkat kehadiran pegawai melalui absensi *fingger print*; 3) Capaian SKP; dan 4) LHKPN dan LHKASN. Pada Triwulan I Tahun 2020 capaian IKU indeks kompetensi dan integritas Stasiun PSDKP Belawan belum ada Skor dari target IKU yang ditetapkan yaitu 72, perhitungan skor dinilai pada akhir tahun 2020.

(2) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi Bitrix24.com dengan target 82 % satu tahun. Perhitungan capaian Presentase unit kerja Stasiun PSDKP Belawan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Triwulan I tahun 2020 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian pada TW I sebesar 100 % melebihi dari target yang di tetapkan pada TW I yaitu sebesar 65%. Data dan informasi yang disajikan dalam Bitrix24.com Stasiun PSDKP Belawan diantaranya berupa : Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Profil Stasiun PSDKP Belawan serta Satuan Pengawas (Satwas) SDKP dan Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Belawan, Update Data Penerbitan SLO.

Bila dibandingkan dengan Capaian IKU pada TW I tahun 2019, IKU ini mengalami peningkatan sebesar 21,94%, karena Capaian Iku pada TW I 2020 tercapai sebesar 100% sementara pada TW I tahun 2019 tercapai 78,06 %. Capaian IKU unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat dilihat pada gambar 4 berikut



Gambar 4. Capaian IKU unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan

(3) Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengukuran penerapan Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP. *Quality assurance* yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Nilai Kinerja RB lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Triwulan I Tahun 2020 belum ada capaian, Capaian IKU akan terealisasi pada TW IV dengan cara mengadopsi langsung dari Eselon I yaitu Direktorat Jenderal PSDKP yaitu 100 %.

(4) Unit kerja berpredikat menuju WBK

WBK (Wilayah Bebas Korupsi) merupakan predikat yang di berikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) kepada unit kerja di instansi pemerintah sekurang-kurangnya eselon III yang

menyelenggarakan fungsi pelayanan. Untuk mencapai predikat WBK, unit kerja harus terlebih dahulu membangun Zona Integritas (ZI). Unit kerja berpredikat WBK lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Triwulan I Tahun 2020 belum ada capaian, Capaian IKU akan terealisasi pada TW IV dengan cara menunggu hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).

(5) Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Persentase pemenuhan dokumen SPIP dapat dijadikan media atau alat evaluasi sekaligus perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian intern yang diadopsi di masing-masing unit kerja. Persentase pemenuhan dokumen SPIP Stasiun PSDKP Belawan periode Triwulan I Tahun 2020 belum ada skor dan perhitungannya akan tercapai pada akhir tahun 2020 dengan mengadopsi langsung dari Eselon I DJ-PSDKP.

(6) Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pemenuhan Dokumen AKIP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada Triwulan I Tahun 2020 belum ada capaian, capaiannya akan terealisasi pada akhir TW IV 2020 dengan mengadopsi langsung dari Eselon I DJ-PSDKP yaitu 100 %.

(7) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan

Pemenuhan Dokumen Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan pada Triwulan I Tahun 2020 belum ada capaian, capaiannya akan terealisasi pada akhir TW IV 2020 yaitu dengan nilai Indeks 80. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2019, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020.

(8) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan

▪ **Nilai Kinerja Anggaran**

Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan meliputi 13 (dua belas) komponen capaian yaitu sebagai berikut: Pengelolaan Uang Persediaan, Data Kontrak, kesalahan SPM, Retur SP2D, Hal III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian tagihan, Rekon LPJ, renkas, Realisasi, Pagu minus dan Dispensasi SPM. Penghitungan capaian

kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW I Tahun 2020 sebesar 74,62%, Karena pada TW I terjadi pandemi Covid -19 maka untuk pengukuran IKPA bersumber dari data yang di berikan dari Eselon I, bukan dari OMSPAN. Target nilai IKPA yang di tetapkan pada tahun 2020 yaitu dengan nilai BAIK (88). Capaian tersebut dapat dilihat pada gambar 5 berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

259	179	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	Nilai	100,00	78,41	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	44,40	100,00	0	94,29	0,00	80,00	61,30	80%	NIA
				Bobot	5	5	5	15	8	5	0	15	12	0	5	0	5			
				Nilai Akhir	5,00	3,92	5,00	15,00	0,00	5,00	0,00	6,66	12,00	0	4,71	0,00	4,00			
				Nilai Aspek	92,80			50,00			59,67			40,00						
260	123	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	Nilai	100,00	22,38	100,00	75,00	100,00	100,00	0,00	88,33	100,00	0	100,00	100,00	80,00	74,62	85%	NIA
				Bobot	5	5	5	15	8	5	0	15	12	0	5	5	5			
				Nilai Akhir	5,00	1,12	5,00	11,25	8,00	5,00	0,00	13,25	12,00	0	5,00	5,00	4,00			
				Nilai Aspek	74,13			68,75			72,08			90,00						

Gambar 5. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

(9) Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun PSDKP Belawan dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan TA. 2019.

Setiap Kementerian/Lembaga baik ditingkat pusat maupun daerah, wajib mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya dengan menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ,Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Untuk meyakini keakuratan data yang disajikan dalam LK tersebut, maka secara berjenjang wajib melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama, dimana hasil rekonsiliasi ini nantinya akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tercapainya target ketaatan Tingkat kepatuhan mencapai 100%. Hal ini didukung oleh konsistensi penerapan berbagai aturan dalam pelaksanaan

kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Capaian Triwulan I TA. 2020 terhadap persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Stasiun PSDKP Belawan TA.2019 yaitu belum ada skor, capaian tersebut akan di nilai pada akhir tahun 2020 dengan mengadopsi langsung dari Eselon I DJ-PSDKP.

(10) Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pemenuhan Dokumen layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan I Tahun 2020 belum ada capaian, capaiannya akan terealisasi pada akhir TW IV 2020 yaitu dengan presentase sebesar 100 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Capaian TW I tahun 2019 untuk IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU TW I pada tahun 2020, karena pada tahun 2019 IKU ini belum ada.

(11) Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pemenuhan Dokumen layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan I Tahun 2020 belum ada capaian, capaiannya akan terealisasi pada akhir TW IV 2020 yaitu dengan presentase sebesar 100 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Capaian TW I tahun 2019 untuk IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU TW I pada tahun 2020, karena pada tahun 2019 IKU ini belum ada.

(12) Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pemenuhan Dokumen layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan I Tahun 2020 belum ada capaian, capaiannya akan terealisasi pada akhir TW IV 2020 yaitu dengan presentase sebesar 100 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Capaian TW I tahun 2019 untuk IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU TW I pada tahun 2020, karena pada tahun 2019 IKU ini belum ada.

Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada Tahun 2020 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2020 tanggal 19 Desember 2019, mendapat alokasi dana sebesar Rp. 76.652.522.000,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

Realisasi anggaran tahun 2020 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai Triwulan I 2020 sebesar 13,25 % atau sebesar Rp 10.159.725.258,- (Sepuluh Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu Rp. 76.652.522.000,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 18 berikut:

Tabel 18. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari – Maret 2020

Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2350	Pemantauan dan Operasi armada	63.660.318.000	7.802.982.197	12,26
2351	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	384.000.000	0	0
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	196.750.000	7.065.840	3,59
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	501.024.000	79.070.198	15,78
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	11.910.430.000	2.270.607.023	19,06
Jumlah		76.652.522.000	10.159.725.258	13,25

Sumber: Bagian Keuangan Stasiun PSDKP Belawan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2020 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun PSDKP Belawan pada tahun anggaran 2020, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi, Stasiun PSDKP Belawan berlandaskan kepada tujuan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Belawan (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

B. Saran

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja.
2. Komitmen semua pihak untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU sesuai dengan yang ditetapkan.
3. Mengembangkan dan meningkatkan SDM pengawasan yang kompeten serta sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap.
4. Mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi potensi pengawasan SDKP, dengan meningkatkan peran Satwas, Wilker lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Rencana tindak lanjut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler.
2. Melakukan Perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mendukung pencapaian IKU.
3. Mengusulkan SDM Pengawas mengikuti diklat dan meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan.
4. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Satwas lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

LAMPIRAN

1. Lampiran Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditiensdkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andri Fahrulsyah**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Maret 2020

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

Andri Fahrulsyah

"berkerja dengan integritas dan totalitas"

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	70
2.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan (pelaku usaha)	16
3.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
4.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	1.01
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	0,07
		6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7. Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1
		8. Jumlah Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1
		9. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	2
		10. Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	2
6.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	11. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	300
		12. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)	80
		13. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	150
		14. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	60
		15. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (orang)	22

diteliti dengan integritas dan ketelitian

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	16. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		17. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
		18. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
8.	Tata kelola pemerintahan yang baik	19. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan [Indeks]	72
		20. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82
		21. Persentase Pemuahan dokumen RB lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
		22. Persentase pemuahan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		23. Persentase pemuahan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		24. Persentase pemuahan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		25. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	1
		26. Persentase Pemuahan dokumen SPIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
		27. Persentase Pemuahan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
		28. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan [Indeks]	80
		29. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Baik [88]
		30. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun PSDKP Belawan dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan TA. 2019 [%]	1

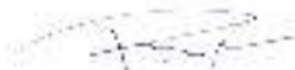
"Adanya dengan integritas dan keadilan"

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemantauan dan Operasi Armada	63.660.318.000
2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	384.000.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	196.750.000
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	501.024.000
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	11.910.430.000
Total Anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Belawan		76.652.522.000

Jakarta, 9 Maret 2020

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan



Tb. Haeru Rahayu



Andri Fahrulisyah

"Berani dengan integritas dan keadilan"